BAB IV DESKRIPSI HASIL WAWANCARA DAN ANALISA

A. Deskripsi Hasil Wawancara

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh tim peneliti, berikut ini adalah deksripsinya.

1. K. H. Asmuni (Guru Danau)

Beliau adalah salah satu seorang sosok ulama kharismatik yang ada di daerah Hulu Sungai dan sekitarnya dan terkenal tidak hanya di Kalimantan Selatan saja, namun juga sampai di luar Kalimantan Selatan. Kiprah beliau tidak hanya sebagai seorang ulama yang memberikan pencerahan agama kepada masyarakat saja, namun juga menjadi “tempat bertanya” masyarakat tentang segala hal. Beliau berusia 61 tahun dengan jumlah jamaah yang tersebar di wilayah Hulu Sungai Utara, Tabalong dan sekitarnya. Saat ini beliau mempunyai empat pondok pesantren dengan jumlah pengajian tiga buah yang berada di Kecamatan Danau panggang dua buah yaitu di desa Bitin, dan desa Danau Panggang dan satunya ada di desa Mabu'un Tabalong. Dengan melihat jumlah jamaah yang begitu besar. Dengan kiprah beliau tersebut, maka pengaruh beliau terhadap masyarakat begitu besar.

Menyikapi tentang persoalan shigat akad dalam transaksi jual beli ini menurut beliau bahwa akad sama dengan ijab kabul dan harus diucapkan dengan lisan dengan kata “jual” dan “tukar”. Ucapan selain kata tersebut seperti “terima kasih” boleh saja dilakukan apabila transaksi yang dilakukan dengan non muslim atau transaksi tersebut dilakukan di pasar modern. Hal ini beliau praktikkan sendiri, ketika bertransaksi sarang burung walet dengan non muslim. Ketika transaksi dilakukan, shigat akad yang diucapkan adalah “jual dengan harga sekian” dan non muslim mengucapkan “terima kasih”. Dalam hal ini beliau menganalogikan shigat akad jual beli dengan akad nikah yang harus diucapkan dengan lisan dan bertatap muka secara langsung. Ini menurut beliau dapat dirujuk dalam kitab *kifayatul akhyar* dan *tuhfah*. Transaksi yang dilakukan tanpa shigat ajab dan kabul sebagaimana di atas menurut beliau bisa dikategorikan sebagai transaksi ribawi.

2. K. H. A. Riduan Kapuh (Guru Duan Kapuh)

Di daerah Hulu Sungai Selatan, ada sebuah majelis taklim yang diikuti jamaah dalam jumlah yang besar, tidak hanya dari kota Kandangan dan sekitarnya saja, namun juga datang dari Kabupaten Tapin. Bahkan di Rantau juga ada majelis taklim yang dipimpin oleh ulama ini yang bertempat di Masjid Humasa pada setiap Selasa sore. Nama beliau adalah

K.H. A. Riduan atau sering disebut dengan Guru Duan Kapuh. Beliau pernah belajar di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo dan setelah itu beliau sempat mengabdikan ilmu beliau di MAPK Martapura dan Pondok Pesantren Hidayatullah Taman Hudaya Bincau Martapura. Menetap di Martapura tidak beliau sia-siakan dengan selalu hadir di setiap pengajian yang digelar, terutama di Sekumpul yang pada saat itu masih dipimpin oleh K.H. M. Zaini Abdul Ghani atau dikenal dengan sebutan Guru Ijai atau Guru Sekumpul. Pemikiran Guru Sekumpul begitu mempengaruhi dalam kehidupan beliau ditambah latar belakang pendidikan Gontor yang modern menjadikan beliau sebagai seorang ulama yang mampu menyelami khazanah keilmuan agama secara modern. Dengan kapasitas beliau sebagai ulama yang disegani dan panutan masyarakat, maka tentu saja apa yang beliau sampaikan dalam setiap pengajian menjadi perhatian dan “petuah” bagi jamaahnya dan berpengaruh bagi masyarakat luas.

Menyikapi persoalan shigat akad dalam transaksi jual beli, menurut beliau bahwa shigat ijab kabul dalam transaksi jual beli harus diucapkan karena persoalan *an taradhin* terletak di hati dan harus diwujudkan dalam bentuk shigat yang diucapkan, hal ini sesuai dengan mazhab Syafi'i yang dianut bahwa shigat ijab kabul wajib hukumnya diucapkan bahkan

dengan mengutip pendapat Guru Sekumpul beliau menyatakan bahwa pengucapan shigat ijab kabul mestinya dijadikan sebagai sebuah kebiasaan atau budaya. Transaksi yang dilakukan tanpa ijab dan kabul maka objek yang ditransaksikan menjadi syubhat. Namun demikian menurut beliau bahwa persoalan pengucapan ijab dan kabul dalam transaksi jual beli masuk dalam wilayah *ijtihadiah*. Oleh karena itu, pengucapannya harus dikembalikan kepada urf. Karena dikembalikan kepada urf setempat, maka apapun bentuk pengucapannya bisa saja dilakukan dan hal tersebut dimaafkan. Ini juga berlaku apabila transaksi yang dilakukan dengan non muslim. Adapun bentuk pengucapan ijab dan kabul harus dilakukan secara lengkap seperti “aku jual kepada engkau barang ini seharga...” karena sebuah kalimat harus ada *fi’il*, *fa’il* dan *maf’ul*-nya.

3. K.H. Sya’rani Tayyib

K.H. Sya’rani Tayyib dikenal sebagai ulama yang berpegang teguh pada hadits dan juga beliau lama bermukim di Makkah dan menimba ilmu keagamaan di kota tersebut dan juga kota Madinah. Pergaulan yang luas dengan para ulama yang bermukim di tanah Hejaz dan juga banyaknya kajian terhadap kitab-kitab keagamaan yang beliau ikuti di majelis ilmu di sana, menjadikan beliau sebagai sosok ulama yang kompeten dan diakui. Beliau dikenal di kalangan para santri di

Martapura sebagai sosok ulama yang moderat dan mengajarkan hadits dengan sanad yang tersambung.

Menyikapi persoalan shigat ijab dan kabul dalam transaksi jual beli beliau menyatakan bahwa apabila dikaji di dalam Alquran maupun hadits tidak ada kewajiban ijab kabul diucapkan. Persoalan tersebut adalah hasil ijtihad para ulama. Bahkan beliau menyatakan bahwa dalam kitab-kitab fikih terutama Syafi'iyah tidak ada keharusan untuk mengucapkan lafadz ijab dan kabul, yang ada adalah kelaziman. Kata kelaziman menurut beliau tidak bisa diartikan sebagai sebuah kewajiban, karena apabila diartikan sebagai sebuah kewajiban, maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat modern sekarang ini adalah tidak sah. Karena tidak sah, maka objek yang ditransaksikan menjadi barang yang haram atau minimal syubhat, dan syubhat sebagaimana diketahui bisa menjatuhkan seseorang kepada tindakan yang haram. Menurut penilaian beliau "kewajiban" pengucapan ijab dan kabul dalam sebuah transaksi jual beli terbentuk dari campuran antara kebiasaan dan taklid yang pada akhirnya mengkristal menjadi sebuah hukum. Prinsip *an Taradhin* dalam transaksi jual beli tidak harus diwujudkan dengan bentuk ucapan "jual beli". Beliau mencontohkan bahwa transaksi yang dilakukan di Makkah dan Madinah serta Mesir tidak mengucapkan kata shigat yang biasa dilakukan oleh

masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan di sana bisa dengan ucapan “terima kasih” atau bahkan tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut penjual dan pembeli setelah masing-masing menerima dan menyerahkan apa yang ditransaksikan. Dengan demikian, sebuah transaksi jual beli tidak ada kewajiban untuk mengucapkan lafadz tertentu. Semuanya dikembalikan kepada kebiasaan atau adat setempat.

4. Guru Nanang Qosim, S.Ag

Beliau adalah salah satu tuan guru yang dikenal di daerah Tanah Bumbu khususnya kota Sungai Danau. Beliau lulusan SMIH Hidayatullah dan Alumni dari STAI Darussalam Martapura. Kiprah dakwah dimulai dari daerah Martapura untuk kemudian menetap di kota Sungai Danau dan membuka majelis taklim yang banyak diikuti oleh jamaahnya yang mayoritas berada di daerah tersebut dan sekitarnya.

Menyikapi persoalan shigat ijab kabul dalam transaksi jual beli, beliau menyatakan bahwa shigat merupakan hal yang sangat esensi dalam sebuah akad, karena itu, ijab dan kabul inklud kedalam makna akad. Sebuah akad tidak akan sempurna apabila tidak diucapkan dengan lafadznya, karena prinsip dari *an taradhin* dalam sebuah transaksi jual beli terletak pada shigat ijab dan kabul yang harus diucapkan. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa kewajiban pengucapan shigat akad merupakan bentuk sikap *ihhtiyat* (kehati-hatian)

dalam mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, kewajiban mengucapkan lafadz tersebut dimulai dari diri kita apakah sebagai penjual atau pembeli, tidak peduli apakah orang lain mengucapkan ijab atau kabulnya ataukah tidak.

5. Guru Padli Jamal

Guru Padli Jamal adalah salah seorang tuan guru di Kota Sungai Danau dengan jumlah jamaah yang hadir begitu banyak pada majelis taklim yang dilaksanakan. Sebagai mana tuan guru yang lain, maka setiap ceramah atau pengajian yang dilaksanakan menjadi petuah, nasehat bagi jamaahnya. Oleh karena itu, apa yang menjadi persepsi beliau menjadi acuan dan referensi, terutama tentang masalah hukum Islam.

Menyikapi persoalan tentang shigat akad dalam transaksi jual beli beliau menyatakan bahwa shigat ijab dan kabul tidak wajib dengan kata "jual dan beli" tapi bisa saja dengan bahasa yang berlaku di masing-masing daerah sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku. Karena menurut beliau prinsip *an taradhin* tidak dimaksudkan dengan kata yang khusus, karena kerelaan bisa saja dalam ungkapan kata yang dipahami oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu ucapan "terima kasih" sudah menunjukkan adanya kerelaan antara pihak yang berakad, dan juga tidak ada kewajiban kata yang diungkapkan harus lengkap.

6. Habib Abdillah Alkaff (Majlis Ta'lim al-Sufi)

Beliau adalah salah seorang dari habaib yang mempunyai majelis taklim dengan jumlah jamaah dan pengaruh ybang besar di kota Sungai Danau. Jamaahnya tidak hanya dari Sungai Danau saja, namun juga wilayah sekitarnya. Jumlah jamaah yang besar menunjukkan bahwa beliau mempunyai pengaruh yang sangat kuat, paling tidak di sekitar daerah tersebut.

Menyikapi persoalan shigat akad menurut beliau bahwa akad dalam muamalat, termasuk jual beli sama dengan akad dalam munakahat, karena itu harus diucapkan karena pada dasarnya *an taradhin* atau kerelaan merupakan prinsip yang harus ada dalam sebuah akad atau perikatan dan prinsip tersebut harus diwujudkan dalam bentuk ucapan. Dalam konteks transaksi jual beli, ijab dan kabul harus tetap diucapkan baik di pasar tradisional maupun modern. Adapun kata yang harus diucapkan adalah “jual dan beli” bahkan apabila objek transaksi adalah barang yang bisa ditimbang dan ditakar, maka harus diucapkan dengan kata “jual seadanya”.

7. H. Syahrani

Di daerah Desa Injir Muara KM. 18 Guru H. Syahrani (usia 56 tahun) merupakan salah seorang tuan guru yang masyhur dengan majelis taklim yang dilaksanakan haru Rabu

sore dan Ahad sore dengan jamaah yang lumayan banyak. Saat ini beliau berusia 68 th.

Dalam menyikapi persoalan shigat akad dalam transaksi jual beli beliau berpendapat bahwa akad sama dengan ijab kabul yang juga bisa disebut dengan shigat. Kewajiban mengucapkan shigat tersebut apabila objek transaksi jual belinya adalah barang yang harganya fluktuasi atau tidak tetap, karena dalam proses transaksi tersebut terjadi tawar menawar harga barang. Apabila tidak dilakukan dengan shigat akad secara verbal transaksinya dikategorikan riba. Hal ini berbeda apabila transaksi yang dilakukan di minimarket, boleh saja dengan ucapan terima kasih, tidak ada kata yang khusus sebagaimana yang selama ini dikenal. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa ijab bisa saja datang dari pihak pembeli atau penjual dan begitu pula dengan Kabul. Yang sangat penting adalah bahwa ijab dan Kabul sebagaimana disebutkan di atas harus diucapkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

8. Drs. H. Ibrahim Hasani

Beliau dikenal sebagai dosen senior yang tidak hanya mengabdikan di IAIN Antasari Banjarmasin saja, namun juga mencurahkan pengabdian beliau di Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin. Di samping itu pula beliau menduduki jabatan di MUI Kalimantan Selatan.

Aktifitas lain yang berkaitan dengan keulamaan, beliau secara rutin melakukan pengajian di rumah dengan jamaah yang hadir dari kalangan mahasiswa.

Menyikapi persoalan shigat akad ini, menurut beliau bahwa shigat akad tidak mesti harus dengan kata-kata tertentu atau harus secara verbal. Shigat akad sebagai manifestasi *an-taradhin* dapat digambarkan dalam berbagai macam bentuk, baik secara lisan maupun dalam bentuk perbuatan atau tindakan, karena pada dasarnya jual beli adalah pertukaran manfaat, dan salah satu cara menghilangkan gharar dalam sebuah transaksi adalah dengan shigat akad. Praktik tersebut tidak hanya dibatasi di pasar tradisional saja, namun juga di pasar-pasar modern yang sekarang ini banyak tersebar, terutama di kota-kota.

9. Dr. H. Sukarni

Saat ini beliau adalah Wakil Rektor II IAIN Antasari sekaligus juga adalah dosen tetap di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan spesialisasi ilmu fikih. Di samping itu beliau juga duduk di Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan.

Menyikapi persoalan shigat akad ini, menurut beliau bahwa akad dalam ushul fikih adalah sebuah kesepakatan, dan bersifat batin, karena akad merupakan wujud dari *an-taradhin*, maka shigat akad bisa dalam bentuk ucapan, tulisan,

perbuatan, sifatnya tidak baku namun temporer dan kondisional. Oleh karena itu, adanya pilihan dalam shigat akad tersebut, maka sah saja sebuah transaksi jual beli apabila tidak dilakukan dengan shigat akad secara lisan. Namun sebaliknya apabila tidak ada pilihan selain dengan verbal atau lisan, maka tidak sah sebuah transaksi dengan lisan. Dengan demikian, kondisional yang dimaksud adalah tidak ada keharusan bahkan kewajiban untuk mengucapkan shigat akad secara verbal. Semua diserahkan kepada pilihan masyarakat untuk menggunakan baik secara verbal atautkah non verbal.

10. H. Taberani Baseri

Responden ini dikenal sebagai salah seorang ulama yang pernah memegang jabatan sebagai imam Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Kapasitas beliau sebagai seorang ulama tidak diragukan lagi. Kiprah beliau tidak hanya di dunia pendidikan, beliau juga dikenal sebagai salah seorang pengurus Majelis Ulama di Kalimantan Selatan.

Menyikapi persoalan shigat akad dalam transaksi jual beli, beliau berpendapat bahwa akad sama dengan ijab dan kabul serta wajib diucapkan apabila transaksi yang dilakukan adalah barang yang tidak tetap harganya atau fluktuatif. Oleh karena itu, bentuk shigat tersebut adalah yang paling sempurna dan hendaknya itulah yang dilakukan. Apabila shigat akad hanya didasarkan kepada adat atau urf masyarakat, tidak

didasarkan kepada aturan fikih, maka transaksinya secara formal sah namun tidak memberikan jaminan hukum transaksi yang dilakukan dibenarkan dalam fikih Islam. Begitu pula transaksi yang dilakukan di mini market atau pasar-pasar yang modern, transaksi yang dilakukan dengan tanpa shigat akad verbal, secara formal sah dan tidak berdosa, namun tidak memberikan jaminan hukum bahwa transaksi yang dilakukan dibenarkan dalam konteks fikih.

B. Analisa Data

Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan di dalam bab II bahwa bermazhab merupakan sebuah pilihan yang bijak dikarenakan mazhab berpijak kepada metodologi dan sumber yang disepakati, di samping bahwa budaya dan kompetensi ulama sendiri tidaklah seperti dulu. Selain itu bahwa bermazhab juga harus berangkat dari kesadaran untuk mengikuti pendapat yang merupakan mazhab yang relevan dalam menjawab persoalan hidup. Walaupun tidak ada ketentuan yang *sharih* atau jelas dari Alquran dan hadits tentang bermazhab, namun paling tidak metodologis (*thariqoh*) yang telah mereka wariskan menjadi pedoman bagi generasi yang akan datang untuk melakukan *istimbath* dan *tathbiq* hukum Islam.

Sebagian besar ulama terutama yang berlatar belakang pendidikan pondok pesantren tradisional yang

diwawancarai menyatakan bahwa akad sama dengan ijab dan kabul. Dengan demikian, mereka mengartikan akad dalam makna yang sempit, atau terjadi penyederhanaan makna akad itu sendiri, karena ijab dan kabul adalah bagian rukun dari sekian rukun yang terdapat dalam sebuah akad. Akad dalam literatur fikih diartikan sebagai sebuah perjanjian atau kontrak tentang apa yang diperjanjikan antara satu pihak atau lebih dengan satu pihak atau lebih yang lain, dan untuk menunjukkan adanya kesepakatan antara para pihak terhadap objek yang diperjanjikan, maka diwajibkan adanya ijab dan kabul atau shigat yang juga bisa menjadi indikasi bahwa kedua belah pihak sudah sadar dan menyakini terjalannya perjanjian di antara mereka sehingga lahirlah sikap "*an taradhin*" atau suka sama suka. Shigat ijab kabul sebagai bagian dari sebuah akad, para ulama sepakat bahwa harus diucapkan walaupun dalam transaksi jual beli khususnya kabul lebih dulu diucapkan dibandingkan ijabnya. Dalam praktiknya, menurut mereka apabila kabul lebih dulu diucapkan oleh pembeli kemudian ijab belakangan, tidak menjadi persoalan karena sama saja menunjukkan adanya kesepakatan terhadap objek yang diperjualbelikan. Begitu pula apabila ijab kabul hanya dilakukan sepihak, misalkan pembeli yang melakukan kabul, dan penjual tidak mengucapkan lapadz ijabnya, maka transaksi yang dilakukan tetap dianggap sah. Dalam hal ini menurut para

responden yang penting adalah dari diri kita dulu sebagai seorang muslim yang mengerti tentang pentingnya ijab dan kabul dalam sebuah transaksi.

Namun bentuk shigat akad ijab kabul yang diucapkan, para responden berbeda pendapat, dan pendapat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua persepsi yaitu pertama bahwa transaksi jual beli harus diucapkan dengan kata “jual dan beli” bahkan ada pendapat satu responden yang menyatakan bahwa apabila objek transaksi adalah barang yang dapat ditakar atau ditimbang, harus ditambah dengan kalimat “jual seadanya”. Alasannya adalah bahwa akad sebagai cara melakukan transaksi pertukaran harus diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Apabila transaksi tersebut tidak dilakukan seperti itu, maka transaksinya bisa dikategorikan sebagai transaksi ribawi. Namun transaksi dengan shigat ijab kabul “jual beli” sebagaimana yang diungkapkan bisa saja tidak dilakukan apabila dilakukan dengan non muslim. Dalam praktiknya misalkan apabila transaksi yang terjadi antara seorang muslim dengan non muslim, muslim mengucapkan “tukar lah” dan non muslim mengucapkan “terima kasih” atau kata yang lain, maka transaksinya dianggap sah dan bukan transaksi riba. Begitu pula apabila transaksi yang dilakukan di pasar modern seperti Mall, mini market atau supermarket yang banyak terdapat di kota-kota besar boleh saja dilakukan dengan

ucapan “terima kasih”. Dengan demikian, pendapat pertama menekankan bahwa ijab dan kabul dengan kata “jual dan beli” harus dilakukan oleh sesama muslim, dan dilakukan tidak di pusat perbelanjaan modern yang biasanya bukan penjual barang langsung yang melakukan transaksi, dan apabila tidak maka transaksinya dikategorikan sebagai transaksi ribawi. Pendapat kedua menyatakan bahwa dengan shigat apa pun transaksinya sah dan tidak masuk dalam kategori riba, karena semua diserahkan dengan adat atau tradisi masyarakat setempat. Tidak ada keharusan untuk mengucapkan kata “jual dan beli” atau “tukar dan jual” sebagaimana pendapat pertama dan lazimnya yang dilakukan oleh masyarakat yang masih memegang secara kuat tradisi keagamaan. Pendapat ini didasarkan kepada alasan bahwa yang sangat urgen dalam sebuah transaksi adalah adanya kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan tersebut tidak harus diungkapkan dengan kalimat atau kata tertentu, namun disesuaikan dengan bahasa dan kebiasaan masyarakat setempat. Pendapat kedua ini nampaknya lebih fleksibel dan lebih relevan dengan kondisi saat ini, di mana tempat untuk bertransaksi lebih beragam, tidak hanya di pasar-pasar tradisional dan warung saja, namun juga di pasar-pasar modern.

Berbeda dengan ulama yang berlatar belakang pendidikan akhir di perguruan tinggi dan bergelut di dunia

akademisi dan diskusi menyatakan bahwa ijab dan kabul itu tidak mesti dilafazkan dan itu persoalan bathin seseorang. Artinya apabila bathinnya yakin dengan diam, maka ijab dan kabul bisa saja dengan diam. Namun apabila bathinnya yakin dengan lafadz, maka bisa saja dilafazkan. Ini menunjukkan bahwa persoalan lafadz ijab dan kabul tidaklah begitu urgen dalam jual beli, karena dengan adanya serah terima barang dan uang sudah menunjukkan adanya kerelaan (*an taradhin*) yang merupakan prinsip pokok dalam sebuah transaksi jual beli.

Saat ini sering dengan perkembangan zaman dan realitas sosial yang semakin kompleks ternyata memberikan pengaruh terhadap pola bermazhab di kalangan ulama dan masyarakat pada umumnya. Ini bisa diketahui dari paparan deskripsi hasil wawancara yang telah dilakukan. Dari temuan data yang dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa ulama Banjar tidak sepenuhnya *Syafi'iyah oriented* dalam menjawab persoalan hukum yang muncul, terutama dalam konteks shigat akad jual beli. Ada dinamika yang berkembang, seiring dengan adanya faktor yang mempengaruhi jawaban persoalan hukum tersebut. Sebagian ulama ada yang cenderung kepada pola pemikiran yang formalistik dan tekstualistik dengan menyatakan bahwa akad jual beli haruslah dilakukan dengan shigat "jual dan beli". Dalam konteks bermazhab, bisa dikatakan bahwa para ulama tersebut bermazhab dengan

pendekatan *qauly*. Bermazhab *qauly* diartikan sebagai sikap mengikuti pendapat-pendapat para imam mujtahid, dalam hal ini mengikuti secara tekstual formal pendapat mazhab Syafi'i. Di samping itu ada sebagian ulama yang bermazhab Syafi'i namun tidak berpolakan mazhab *qauly*, tapi berpola mazhab *manhajy*. Metode atau pola mazhab *manhajy* diartikan sebagai suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran dan akidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Atau bisa pula dikatakan bahwa pola mazhab *manhajy* yaitu dengan mengikuti secara metodologis istimbat hukum mazhab yang dimulai dengan mencari ayat Alquran, kemudian hadits Nabi, ditambah dengan menggunakan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* atau *ushuliyyah* sebagai landasan pemahamannya. Metode atau pola ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa fikih sebagai sebuah produk hukum sebegini besar tidak bersifat statis, namun sebaliknya dinamis dan diyakini harus relevan dengan perkembangan sosial kemasyarakatan. Dengan hanya mengandalkan pendapat mazhab secara *qauly* tentu saja akan melahirkan kejumudan dan kesusahan, karena pendapat para mujtahid dan imam mazhab adalah produk fikih pada zamannya, dan tidak untuk zaman setelahnya. Oleh karena itu, persoalan akan semakin kompleks dan menuntut kepada kepastian hukum. Dengan bermazhab *manhajy* diyakini dapat menjawab persoalan-

persoalan tersebut, dengan tetap berada pada koridor mazhab yang diikuti.

Pola bermazhab *manhajy* sebagai paradigma yang lebih responsif dan kontekstual dalam menyikapi problem sosial dianggap mampu untuk lebih aspiratif. Dari beberapa responden yang diwawancarai ada kecenderungan bahwa ulama yang mempunyai pola pikir *manhajy* dibekali oleh sumber pengetahuan yang tidak terbatas pada satu mazhab saja. Atmosfer kajian lintas mazhab ini dipenuhi dengan referensi, diskusi, dan kajian yang intensif sehingga cenderung ulama ini mempunyai pemikiran yang terbuka, dan responsif terhadap perubahan zaman. Sebaliknya responden ulama yang berpola mazhab *qauliy* diduga sebagai akibat dari keterbatasan sumber bacaan mereka yang hanya dalam satu mazhab, sehingga berdampak pada keterbatasan khazanah pengetahuan yang mereka miliki dan bermuara kepada munculnya pemahaman tunggal dan kurang responsifnya terhadap mazhab fikih di luar mazhab yang dianut.

Pendapat yang lebih progresif dikemukakan oleh responden yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban shigat akad dilafadzkan, karena dengan diam saja sudah menunjukkan adanya "*an taradhin*" yang merupakan asas dari sebuah jual beli. Karena persoalan kerelaan adalah persoalan bathiniyah seseorang, maka apabila yakin dengan lafadz bisa saja

dilafadzkan, dan apabila didiamkan saja maka jual belinya tetap dianggap sah. Dalam perspektif mazhab, pendapat itu tentu saja sudah keluar dari apa yang berlaku secara umum dalam mazhab Syafi'i, karena dalam mazhab ini sebuah shigat akad harus diucapkan baik dengan kata yang *sharih* ataupun sindirian, dan transaksi yang tidak diucapkan dengan lafadz dianggap tidak sah. Jumhur ulama-termasuk sebagian kecil ulama mazhab Syafi'i yaitu an-Nawawi dan al-Baghawy menyatakan bahwa transaksi dengan diam tanpa shigat akad dinyatakan sah, apabila sudah menjadi sebuah tradisi di masyarakat, dan jual beli itu disebut dengan *ba'i al-mu'atah*,¹ yaitu sebuah bentuk transaksi jual beli yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun dalam shigat akadnya. Shigat akad sebagai bentuk kerelaan tidak harus diucapkan sebagai bukti adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Namun dengan saling serah terima uang dan barang sudah menunjukkan bahwa terjadi saling kerelaan untuk melepas dan mengambil uang atau barang sebagai bentuk kesepakatan dalam transaksi jual beli.

Secara umum dapat dikatakan bahwa transaksi muamalat, termasuk jual beli, pada dasarnya diserahkan kepada tradisi dan adat yang berlaku di tengah-tengah

¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), hlm.117.

masyarakat. Nilai sosial berupa tradisi tersebut bisa saja bergeser seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Di sinilah hikmah syarak tidak menetapkan aturan yang rinci dalam bidang muamalat. Semuanya kembali kepada apa yang menjadi kesepakatan dan kebiasaan masyarakat untuk mewujudkan kemudahan dan kemaslahatan hidup mereka. Tentu saja dalam syariat ada norma-norma yang harus diperhatikan dan diatur secara tegas tentang kbolehkan dan ketidakbolehkan bertransaksi. Namun aturan yang rinci dalam muamalat hanya menyentuh persoalan yang diharamkan oleh syarak. Selebihnya selama tidak ada aturan yang tegas, maka dikembalikan kepada masyarakat untuk mengaturnya sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, para ulama merumuskan sebuah kaidah umum yang berlaku dalam konteks muamalat yaitu pada dasarnya semua transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang menyatakan keharamannya.